



JI 2 (2) (2017)

JPK

Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>



KECENDERUNGAN GLOBAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH

IHSAN[✉]

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2017

Disetujui Juli 2017

Dipublikasikan Juli 2017

Keywords:

Citizens, The Direct Local Leader Elections, political participations.

How to Cite:

Ihsan (2017).

Kecenderungan Global Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah. *Jurnal Pancasila dan*

Kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2 : Halaman 49-58

Abstrak

Kecenderungan global dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk demokrasi yang secara luar biasa berpotensi mempengaruhi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional. kecenderungan global itu adalah komponen-komponen yang saling berinterelasi, pengajaran konsep-konsep inti secara sistematis, analisis terhadap studi kasus, keterampilan-keterampilan pembuatan keputusan, analisis komparatif, keterampilan partisipatoris dan kebijakan warga negara melalui kegiatan-kegiatan belajar, penggunaan buku sumber, pengetahuan, keterampilan dan kebijakan-kebijakan warga negara, dan menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar mengajar pengetahuan, keterampilan dan kebijakan-kebijakan warga negara. Berdasarkan kecenderungan global, kajian tentang kecenderungan global dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan cukup berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan di Indonesia.

Abstract

Global a tendency in education pancasila and citizenship for democracy in an outstanding manner have the potential to affect pancasila education and citizenship on states who adheres to ideology constitutional democracy. A tendency that global is a component of rival berinterelasi, teaching the concepts of the nucleus of titling, the analysis on a case study, decision making skills, comparative analysis, participatory skill and the policies of citizens through activities of learn, a source of the use of a book, knowledge, skill and virtue a citizen , and connecting between the content and the process of teaching and learning in knowledge , skill and in the wisdom of a citizen. Based on global a tendency, studies on global a tendency in education pancasila and citizenship has influenced to the development of pancasila education and citizenship at the rate of schools in Indonesian

© 2017 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

✉ Alamat korespondensi:

STKIP Muhammadiyah Sorong E-mail:
Ahmadmihsan0@gmail.com

ISSN 2527-7057 (Online)

ISSN 2549-2683 (Printed)

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini, warga negara suatu bangsa dihadapkan pada berbagai perubahan dan ketidakpastian seiring dengan perkembangan konstelasi kehidupan dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Negara Indonesia, pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998, mendorong turut melakukan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan mendasar menurut Azis Wahab (2006:61) adalah suatu kehidupan yang lebih bebas, lebih demokratis, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum dan keadilan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia.

Tuntutan perubahan mendasar di atas lanjut Wahab (2006:61) direspon oleh berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk elemen fundamental, yaitu pendidikan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan manusia-manusia, warga negara/warga masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti dikemukakan di atas. Pendidikan sebagai elemen dalam proses perubahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa “berkembangnya potensi peserta didik agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warganegara

yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, merupakan (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan (Winataputra, 2006).

Pendidikan kewarganegaraan tentu saja membawa implikasi dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah (sebagai mata pelajaran). PKn di sekolah merupakan “mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”.

PEMBAHASAN

Kecenderungan Global dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Zaman era reformasi telah membuka jalan ke arah terwujudnya paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Paradigma baru itu berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis (Muchson AR, 2003). Hal ini sejalan dengan kecenderungan global pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk demokrasi (John J Patric, 1997). Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan paradigma baru berupaya memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Misi pancasila dan kewarganegaraan adalah menciptakan kompetensi warga negara yang baik (*good citizenship*) supaya mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan.

Visi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bertujuan mewujudkan masyarakat demokratis merupakan reaksi

atas kesalahan paradigm lama yang berlabelkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dari beberapa kajian literatur, seperti dikemukakan oleh Winarno (2006:24), mata pelajaran PPKn sangat menyolok dengan misi mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, menghargai, dan lain-lain yang dirasionalisasikan demi kepentingan pemerintahan untuk mendukung pembangunan nasional. PPKn masa itu sesungguhnya merupakan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, tidak aneh kalau PPKn dianggap lebih politis daripada akademis yang pada akhirnya di tingkat persekolahan, mata pelajaran ini cenderung terdiskreditkan dan tidak banyak diminati siswa.

Lahirnya paradigma baru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan itu tentu bukanlah kebetulan. Ia lahir dari harapan pendidikan di Indonesia untuk dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bagian Rasional Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). Hal ini penting, sebab secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Harapan dalam pelaksanaan pendidikan nasional, tergambar dalam hakikat Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dirumuskan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai negara dan bangsa yang terus terhubung dengan bangsa-bangsa yang lain, negara Indonesia tidak mungkin melepaskan dari perkembangan global. Begitu pun halnya dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Standar Isi mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, tidak terlepas dari adanya kecenderungan-kecenderungan global dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Kecenderungan global dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diadaptasi dari pendapat John J. Patric (1997). Kecenderungan global itu tergambar dalam uraian berikut:

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam Konseptualisasi yaitu komponen-komponen yang saling berinterelasi. Secara substantif, mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan mempelajari prinsip-prinsip sekaligus mempraktekkan "democratic governance and citizens". Tentang komponen-komponen yang berinterelasi itu, sebuah penelitian The International Association for Evaluation Achievement (IEA) sebagaimana dikemukakan Samsuri (2006:35) terhadap implementasi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di 28 negara, menemukan komponen pendidikan kewarganegaraan yaitu meliputi aspek civic knowledge, civic engagement, dan civic attitudes dan konsep lainnya (Torney-Putra, et.all, 2001:179). Adapun materi kajian pendidikan kewarganegaraan yang dikaji meliputi materi demokrasi, kewarganegaraan, identitas nasional, hubungan internasional dan keragaman/kohesi sosial (Torney-Putra, et.al, 2001:29-30).

Selain hasil penelitian IEA di atas, John J Patrick (1999:33) berpendapat bahwa ada

empat komponen atau kategori pokok yang dapat dikaji secara beragam dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu: 1) pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis (knowledge of citizenship and government in democracy [civic knowledge]); 2) kecakapan kognitif dari kewarganegaraan demokratis (cognitive skills of democratic citizenship [cognitive civic skills]); 3) kecakapan partisipasi dari kewarganegaraan demokratis (participatory skills of democratic citizenship [participatory civic skills]); dan 4) keutamaan karakter kewarganegaraan yang demokratis (virtues and dispositions of democratic citizenship [civic disposition]).

Dari keempat komponen pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara demokratis (Patric, 1999:34; dan Patric, 2003:9) tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Knowledge of citizenship and government in democracy (civic knowledge)
2. Cognitive skills of democratic citizenship (intellectual civic skills)
3. Participator skills of democratic citizenship (participatory civic skills)
4. Virtues and dispositions of democratic citizenship (civic disposition)

Dari paparan konseptual komponen kajian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tersebut, secara ringkas warga negara yang demokratis memiliki ciri-ciri penguasaan secara komprehensif dalam hal pengetahuan mengenai pancasila sebagai dasar Negara, kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis, kecakapan intelektual (kognitif) dan partisipasi dalam hal kewarganegaraan demokratis, dan karakter kewarganegaraan yang demokratis (Samsuri, 2006:39). Komponen tersebut tidak mungkin timbul begitu saja pada diri

individu warga negara, sehingga perlu proses habituation, dan pembelajaran.

Dari keempat komponen itu, Patric dan Vonts (2001:46) sebagaimana dikemukakan oleh Samsuri (2006:47) menjabarkan ke dalam materi kajian pengetahuan pendidikan kewarganegaraan menjadi tujuh topik, yaitu: 1) demokrasi perwakilan (representative democracy); 2) konstitusionalisme; 3) hak asasi manusia (liberalism); 4) kewarganegaraan (citizenship); 5) masyarakat sipil (civil society); 6) ekonomi pasar (free and open economic sistem); dan 7) tipe-tipe isu publik.

Implikasi Kecenderungan Global Pendidikan Kewarganegaraan

Implikasi pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan di Indonesia. Pendapat ini ditegaskan oleh Azis Wahab (2011:15) yang menyebut bahwa kesembilan kecenderungan global ini secara luar biasa berpotensi mempengaruhi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada negara-negara yang menganut faham demokrasi konstitusional.

Pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi. Dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam hal ini, pembelajaran merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Pembelajaran merupakan subyek khusus dari pendidikan Corey (1986).

Mencermati beberapa konsep pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam pembelajaran terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik, melibatkan

unsur-unsur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran dalam menggambarkan kegiatan guru mengajar dan siswa sebagai pembelajar dan unsur-unsur lain yang saling mempengaruhi.

Pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, karena didalamnya terdapat beberapa komponen pembelajaran yang saling terkait antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dan saling A system ketergan is integrated set of element that interact wich each other". Komponen-kompenen pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) tujuan, (2) bahan, (3) metoda, (4) media, (5) evaluasi.

Pertama, Komonen Tujuan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ditingkat persekolahan memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi,
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya,
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

Rumusan tujuan tersebut di atas, menurut analisis Samsuri (2011:3) memiliki kemiripan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam dokumen National Standards for Civics and Government yang dikembangkan oleh Center for Civic

Education (1999) Calabasas, Amerika Serikat. National Standards for Civics and Government merumuskan tujuan pembelajaran civics dalam tiga bentuk komponen kompetensi kewargaan, yaitu civic knowledge, civic skills yang memuat kecakapan intelektual dan partisipatori, dan civic dispositions. Hanya saja, konteks keIndonesiaan seperti dalam hal pendidikan anti korupsi tampaknya sejalan dengan politik nasional untuk melawan korupsi sebagai perwujudan dari gerakan reformasi nasional. Hal tersebut menjadikan civics persekolahan model Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri.

Kedua, Bahan Atau Materi Pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002:50). Materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran, termasuk proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tanpa materi pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Materi pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip maupun prosedur (Sudarman, 2003:162).

Guru mempunyai tugas yang penting dalam mengembangkan dan memperkaya materi pembelajaran, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran, yaitu: 1) materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai; 2) materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa pada umumnya; 3) materi pembelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematis dan berkesinambungan; dan 4) materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat tekstual maupun kontekstual (Djamarah dan Zain, 2003:51).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan, materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengacu pada kompetensi yang ingin dicapai. Materi yang dibelajarkan harus bermakna bagi siswa dan merupakan bahan-bahan yang benar-benar penting, baik dilihat dari kompetensi yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk menentukan materi pada proses pembelajaran berikutnya.

Ketiga, metode pembelajaran PKn. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran berakhir (Djamarah, 2002:72).

Keberhasilan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran, tetapi juga didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode yang tepat dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan membantu guru maupun siswa untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun metode yang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah yang berkarakteristik sebagai berikut: 1) menekankan pada pemecahan masalah; 2) bisa dijalankan dijalankan dalam berbagai konteks; 3) mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri; 4) mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda; 5) mendorong siswa untuk merancang dan melakukan kegiatan ilmiah; 6) memotivasi siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari; 7) menerapkan penilaian otentik; dan 8) menyenangkan (Djamarah dan Zain, 2002:122)

Disamping metode, kita juga mengenal model pembelajaran. Dalam rangka sosialisasi KTSP, Departemen Pendidikan Nasional (2006) membagi tiga jenis model pembelajaran, yakni: 1) Model Pembelajaran Langsung atau Direct Instruction (DI), 2) Model Pembelajaran Kooperatif atau Cooperative Learning (CL), dan 3) Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem-Based Instruction (PBI).

Oleh karena itu, peran guru melalui model pembelajaran ini hendaknya berupaya lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran secara terbuka, demokratis, dan memiliki kebebasan berpendapat.

Pada hakikatnya, ketiga model pembelajaran di atas dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan dengan terlebih dahulu melakukan modifikasi atau penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik siswa. Namun, apabila memperhatikan tujuan pembelajaran sebagaimana ditentukan dalam standar isi mata pelajaran PKn, maka model kedua dan ketiga perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Sesuai dengan tuntutan standar isi mata pelajaran PKn, model pembelajaran berbasis masalah sangat dianjurkan untuk dikuasai dan diterapkan dalam pembelajaran PKn. Model ini menggunakan pendekatan inkuiri yang sangat penting bagi PKn.

Model pembelajaran dengan pendekatan inkuiri pada hakekatnya sejalan dengan gagasan John Dewey tentang prinsip-prinsip pembelajaran interaktif. Keberhasilan pembelajaran demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu seni akan ditentukan oleh prinsip-prinsip pembelajaran interaktif model John Dewey, yakni:

1. Menghormati dan penuh perhatian kepada orang lain
2. Berpikir kreatif

3. Menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah-masalah bersama
4. Berusaha menerapkan solusi-solusi tersebut

Keempat, Komponen Media Dan Sumber Pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002:139). Penggunaan media pembelajaran pada dasarnya adalah untuk membantu mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu ide tau teori. Media pembelajaran sangat diperlukan pada anak-anak tingkat dasar sampai menengah, dan akan banyak berkurang jika mereka sudah sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat sekolah dasar dan menengah, media pembelajaran akan banyak membantu anak didik dengan mengembangkan semua indera yang ada, yakni dengan mendengar, melihat, meraba, memanipulasi, atau mendemonstrasikan dengan media yang dapat dipilih.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kehadiran media mempunyai arti yang sangat penting. Ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat diminimalisir dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan materi yang akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan menggunakan media. Bahkan keabstrakan materi pembelajaran dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Media dapat mewakili apa yang kurang dapat guru sampaikan melalui kata-kata atau kalimat tertentu.

Jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam setiap mata pelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah:

- a. Media audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, casette recorder, dan piringan hitam.

- b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti foto, gambar, lukisan, dan sebagainya, ada pula media visual yang menampilkan gambar bergerak seperti film bisu dan film kartun.
- c. Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua (Djamarah dan Zain, 2002:141).

Dalam proses pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, selain media-media di atas, masyarakat merupakan sumber dan media utama dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Dalam masyarakat, siswa dapat melihat langsung proses sosial yang sedang berlangsung, kepada siswa diperkenalkan konsep geografi setempat, masalah kehidupan kelompok, proses dan mekanisme pemerintahan, aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa, adat istiadat setempat, dan lokasi warisan sejarah yang ada.

Untuk memperankan masyarakat sebagai media pembelajaran, guru memerlukan informasi yang akurat dan memadai mengenai orang-orang, lembaga, peristiwa, keadaan yang ada di dalam masyarakat. Ada dua cara yang dapat dilakukan guru untuk menggunakan sumber masyarakat setempat sebagai program pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, yaitu: pertama, mengundang anggota atau tokoh masyarakat setempat ke dalam kelas untuk berbicara dengan siswa-siswa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan profesinya (pekerjaannya). Terlebih dahulu guru mengkomunikasikan kepada pembicara tentang tujuan undangan itu, sehingga dapat berbicara santai dan

menyesuaikan diri dalam menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak SD. Umumnya narasumber yang bersangkutan berbicara tentang pengalaman hidup mereka sehari-hari atau tentang masa lalu.

Kedua, mengunjungi langsung anggota-anggota atau tokoh-tokoh masyarakat di tempat mereka tinggal atau berada. Untuk itu siswa-siswa perlu diberi penjelasan lebih dahulu tentang tujuan kunjungan itu dan mereka harus menyiapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka ajukan.

Berkaitan dengan sumber pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dapat dikemukakan bahwa sumber pembelajaran pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat terdapatnya materi pembelajaran atau asal untuk belajar seseorang (Winataputra dan Ardiwinata, 1991:165). Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan/materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi siswa selaku peserta didik.

Sumber belajar terdapat di mana-mana, seperti di sekolah, di rumah, di pusat kota dan sebagainya. Pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut tergantung pada kreatifitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya (Sudarman, 1991:2003). Winataputra dan Ardiwinata (1991:165) berpendapat bahwa setidaknya terdapat lima macam sumber belajar, yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, lingkungan (lingkungan alam, lingkungan sejarah dan lingkungan masyarakat), dan media pendidikan.

Kelima, Komponen Evaluasi. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam

mengambil keputusan (Depdiknas, 2003:20). Menurut Djahiri (2005:2), evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan momentum/instrumen untuk mengukur/menilai tingkat keberhasilan, kegagalan, kelebihan atau kekurangan proses dan hasil belajar serta momentum untuk melakukan relearning yang bersifat kontinyu, multidimensional, dan terbuka. Dengan kata lain, evaluasi merupakan media untuk mengukur ketercapaian suatu kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dalam proses evaluasi, sebenarnya terdapat tiga istilah yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi, yaitu: penilaian, pengukuran dan tes. Ketiga istilah itu seringkali disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya Gronlund sebagaimana dikemukakan (Rahmat, 2008:181) memberikan penjelasan untuk ketiga istilah tersebut sebagai berikut: Penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu (siswa). Sedangkan Tes adalah salah satu alat atau bentuk dari pengukuran.

Penilaian pembelajaran PKn dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian kelas (classroom assessment) dan oleh satuan pendidikan.

Untuk penentuan nilai akhir pada satuan pendidikan melalui ujian sekolah dan rapat dewan pendidik. Standar penilaian berorientasi pada tingkat penguasaan kompetensi yang ditargetkan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SI adalah ruang lingkup materi dan

tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 butir 5 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Sedangkan SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Pasal 1 butir 4 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Untuk mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhis semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Pasal 63 ayat 1 dan 2 5 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, penilaian hasil belajar dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Pasal 64 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Menurut Azis Wahab sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat, dkk (2008:190),

penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga fungsi penting sebagai berikut:

- a. sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kekurangan siswa, guru ataupun program pengajaran yang telah disampaikan melalui proses belajar mengajar.
- b. Sebagai media klasifikasi, identifikasi, serta penalaran diri, nilai, moral, dan masalah.
- c. Sebagai media edukasi (re-edukasi) nilai-nilai moral.

Evaluasi pembelajaran Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan harus bersifat utuh. Artinya evaluasi pembelajaran dilakukan baik dalam proses maupun hasil belajar yang menyangkut aspek kognitif, afektif maupun psikomotor (Al-Mukhtar, 2004:373). Dengan demikian, semua ranah kehidupan siswa menjadi objek evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

PENUTUP

Perkembangan kajian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam dunia global telah melahirkan kecenderungan global dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan di Indonesia. Kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan nampak dalam visi dan misi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia yang berorientasi pada terbentuknya warga negara yang baik, cerdas, dan demokratis. Keseluruhan kecenderungan global itu berimplikasi pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan, yaitu pada komponen tujuan, materi, metode, media dan sumber, serta evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. (1990). *Corruption: its nature, causes and consequences aldershot*. Brookfield Vt: Avebury
- Almond, Gabriel A. & Sidney Verba (1990). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Azra, Azyumardy (2010). Islam, corruption, good governance, and civil society: the Indonesian experience. *Islam and Civilisational Renewal Journal* Vol 2, No 1 Tahun 2010 hlm. 14-31
- Baowollo, Rober B. (2008). *Pilkada, Direct Civil Participation, dan Civil Society: Merumuskan Peran NGO dalam Proses Pilkada*. Dalam Gregorius Sahdan, dkk. (Eds). *Negara dalam Pilkada: Dari Collapse State ke Weak State*. Yogyakarta: IPS Press
- Budiarjo, Miriam. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Eko, Sutoro. (2003). *Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: APMD
- Fahmi, Khairul. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015*, hlm. 264-283
- Gaffar, Affan. (2006). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jain, Arvin K. (2001). *Corruption: a review*. *Journal of Economic Surveys, Vol. 15 No. 1* hlm. 71-121
- Huntington, Samuel P & Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Koalisi Pilkada Bersih. (2017). *Rilis Media Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada serentak 2017*. Diakses dari <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf> pada Sabtu, 20 Mei 2017 Jam 01.19 WIB
- Komisi Pemilihan Umum. (2017). *Pemungutan Suara Pilkada 2018 Direncanakan 27 Juni 2018*. Diakses dari <http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/5979/Pemungutan-Suara-Pilkada-2018-Direncanakan-27-Juni-2018> pada Sabtu, 20 Mei 2017 Jam 11.08 WIB
- Lucky, Ovwasa O. (2013). Money Politics And Vote Buying In Nigeria: The Bane Of Good Governance. *Afro Asian Journal of Social Sciences Volume 4, No. 4.3 Quarter III 2013*, hlm. 1-19
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*.

- Jakarta: Penerbit Kencana
Prenada Media Group
- Muhtadi, Burhanuddin. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 No. 1 Juni 2013*, hlm. 41-58
- Najib, Mohammad et.al. (2014). *Pengawasan Pemilu Problem Dan & Tantangan*. Yogyakarta: Bawaslu Propinsi DIY
- Nurhasim, Moch. (2014). Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan. dalam Moch. Nurhasim (Ed). (2014). *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum
- Putra, Lutfy Mairizal. (2017). *Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2017*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017> pada Sabtu, 20 Mei 2017 Jam 11.08 WIB
- Santoso, Topo. dkk. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- Soerensen, Georg. (2014). *Demokrasi dan Demokratisasi* (Terjemahan I. Made Krisna). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sutrisno, Cucu. (2015). *Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Polisi Di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Skripsi FIS UNY (Tidak diterbitkan)
- Tanzi, Vito. (1998). Corruption around the world causes, consequences, scope, and cures. *Jurnal IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4 (December 1998)*, hlm. 559-594
- Treisman, Daniel. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics, 76 (2000)* hlm. 399–457
- Winardi. (2009). Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009*, hlm. 150-165
- Winarno, Budi. (2008). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo